



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Rabu 30 April 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI



**PEDULI:** Direktur RS Siti Hajar dr H Iqbal Faizin (tiga dari kanan) memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk guru TPQ, guru agama, dan marbot masjid dalam Harlah ke-62 RS Siti Hajar kemarin (29/4).

### Para Tokoh NU Dapat Kartu Prioritas Layanan RS Siti Hajar

**SIDOARJO** - Pada momen peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-62 kemarin (29/4), RS Siti Hajar Sidoarjo meluncurkan kartu prioritas layanan kesehatan eksekutif untuk para tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Mereka bisa mendapat layanan lebih cepat. Direktur RS Siti Hajar dr H Iqbal Faizin menyampaikan, kartu layanan prioritas bernama Siscard itu diberikan ke para tokoh NU di Sidoarjo. "Ini kartu khusus untuk pelayanan yang lebih cepat dan nyaman. Insya Allah ke depan bisa juga untuk pasien eksekutif umum lainnya," tambahnya. Selain itu, RS Siti Hajar juga mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para guru TPQ hingga marbot masjid di sekitar lingkungan rumah sakit. (eza/uzi)

Pemerintah

### Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana Lakukan Sidak Perbaikan RTLH Di Desa Kletek

Media Sorot Mata 29 April 2025



### Sidoarjo Terima Penghargaan Pembangunan Daerah 2025

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Terbaik I Kategori Kabupaten dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, dalam acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (29/4). Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Sidoarjo karena untuk pertama kalinya sejak Anugerah PPD digital Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih juara sejak sebagai kabupaten dengan pemenuhan dan pelaksanaan pembangunan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan ajang evaluasi dan apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam prasyarat, pelaksanaan, serta pencapaian pembangunan, termasuk aspek yang diutamakan.



Bupati Sidoarjo Subandi menerima penghargaan Pembangunan Daerah.

"Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi dari seluruh elemen daerah. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," ujar Bupati Subandi. Kata Subandi, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dalam proses selanjutnya, PPD akan dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui ajang tersebut, Kabupaten Sidoarjo berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.



**RATA:** Petugas menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan liar di atas saluran air di Jalan Rajawali, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, kemarin (29/4).

### 22 Bangli di Gemurung Dibongkar

**Jadi Penyebab Banjir Karena Hambat Aliran Air**

**SIDOARJO** - Satpol PP Sidoarjo membongkar 22 bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas saluran air di Desa Gemurung, Gedangan kemarin (29/4). Bangli tersebut menghambat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, di atas saluran air itu ada 22 bangli. Kini semuanya sudah

dibongkar. "Jumlah banglinya ada 22, sedangkan yang sudah dibongkar mandiri oleh pemilik ada 13, sisanya kita tertibkan hari ini (kemarin, Red)," katanya. Penderitaan berkepanjangan. Namun, ada sejumlah warga yang meminta ganti rugi ke Satpol PP dan Pemkab Sidoarjo. "Sempat ada yang minta, tapi kami tidak punya anggaran untuk itu, kita akan sampaikan ke pimpinan," imbuhnya. Yany mengatakan, penerbitan itu sebenarnya direncanakan sejak era bupati sebelumnya. Akan tetapi, sejumlah pedagang enggan

pindah. "Ini kan lahan saluran air. Selama bangunan masih berdiri, normalisasi nggak bisa dilakukan. Akibatnya air dari perumahan sekitar nggak bisa mengalir, jadi banjir," jelasnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DIPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menambatkan, penertiban ini juga merupakan upaya untuk mengatasi potensi banjir di wilayah timur Sidoarjo. "Targetnya dua hari pembongkaran, lalu dilanjutkan dengan normalisasi," katanya. (eza/uzi)

### RSI Siti Hajar Luncurkan 'Red Carpet' Layanan Kesehatan dan BPJS Gratis untuk Marbot



**PRIORITAS:** Direktur RSI Siti Hajar, dr Iqbal Faizin, saat membagikan Siscard kepada tamu undangan.

**KOTA**-Dalam rangka memperingati hari lahir (harlah) ke-62, RSI Siti Hajar meluncurkan program layanan kesehatan prioritas dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja sektor informal. Acara yang dikemas dalam bentuk halalbihalal ini digelar pada Selasa (29/4), dan dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Timur, jajaran PCNU, serta para Ketua MWC dan PAC Muslimat

se-Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan tersebut, rumah sakit membagikan Siti Hajar Priority Card (Siscard), yaitu kartu layanan kesehatan prioritas yang memungkinkan pemegangnya mendapatkan pelayanan tanpa harus antri lama. Selain itu, obat yang dibutuhkan akan langsung dikirim ke rumah pasien. "Kami menyebut ini sebagai layanan 'red carpet', karena menjadi bentuk

pelayanan khusus dan cepat bagi para pemegang kartu," ujar Direktur RSI Siti Hajar, dr Iqbal Faizin, kepada Radar Sidoarjo. Selain layanan prioritas, RSI Siti Hajar juga bekerja sama dalam memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada pekerja informal, seperti guru TPQ, pengajar TPA, dan marbot masjid yang selama ini belum memiliki jaminan sosial. (sai/vga)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## MK Ubah Tafsir UU ITE Terkait Kerusakan di Medsos

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir baru terhadap Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). MK menyatakan, kerusakan di media sosial (medsos) tidak memenuhi unsur pidana.

Hal itu diputuskan MK dalam perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh jaksa asal Ngawi, Jawa Timur, Jovi Andrea Bachtiar. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung

MK, Jakarta, kemarin (29/4).

Pasal 28 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat dapat dijerat hukum. Namun, dalam putusannya, MK menyatakan frasa "kerusakan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. "Sepanjang tidak dimaknai



Suhartoyo

kerusakan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber," kata Suhartoyo.

Hakim MK Arsul Sani menambahkan, bentuk kerusakan atau keonaran dalam

UU ITE tidak memiliki parameter yang jelas. Hal itu bisa memicu tafsir yang karet.

Selain itu, bentuk kerusakan juga dinilai tidak relevan dengan perkembangan zaman ketika teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, aksi mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik seyogianya disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

"Bukan serta-merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum," katanya. (far/ttg)

mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) yang tengah menjadi sorotan.

"Nggak ada (pembahasan tentang Hasan Nasbi)," kata Muzani setelah makan siang.

Terkait siapa yang berpeluang menggantikan Nasbi, Muzani juga memilih bungkam. Yang jelas, ia memastikan PCO akan tetap ada pascamundurnya Hasan. Ia juga berharap komunikasi pemerintahan bisa terus disempurnakan.

Meski surat sudah dikirim Hasan, Prabowo belum mengambil sikap. "Bapak Presiden sudah kami beri laporan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo

## Jawa Pos

### Mendikdasmen: 75 Persen Anak Usia 15 Tahun Tak Paham Materi yang Dibaca

82 Persen Sulit Terapkan Matematika dalam Keseharian

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut kemampuan literasi

dan numerasi anak Indonesia usia 15 tahun masih kurang. Mereka dapat membaca, namun tidak bisa memahami materi yang dibaca. Anak-anak juga kesulitan memahami penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Mu'ti mengatakan, ada 75

persen anak-anak yang kemampuan literasinya masih di bawah level 2 PISA (*Programme for International Student Assessment*). "Mereka kesulitan memahami gagasan utama dari sebuah teks panjang," jelasnya saat menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar



Abdul Mu'ti

dan Menengah di kantor PPSDM Kemendikdasmen, di Depok, kemarin (29/4).

Kecapaian numerasi anak-anak juga mengkhawatirkan. Menurut Mu'ti, 82 persen anak usia 15 tahun memiliki kemampuan matematika di bawah level 2 PISA. "Mereka kesulitan

memahami implementasi matematika dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Persentase siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi mayoritas berada di wilayah Pulau Jawa, sebagian Kalimantan seperti wilayah Kalimantan Timur (Kalim) dan

Kalimantan Selatan (Kalsel), Riau. Selebihnya, didominasi wilayah Indonesia Timur seperti di Papua dan Maluku.

Sementara itu, siswa yang kemampuan numerasinya di bawah 40 persen didominasi di wilayah Indonesia Timur. (mia/aph)

## Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

RATA: Petugas menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan liar di atas saluran air di Jalan Rajawalli, Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, kemarin (29/4).

## 22 Bangli di Gemurung Dibongkar

### Jadi Penyebab Banjir Karena Hambat Aliran Air

SIDOARJO - Satpol PP Sidoarjo membongkar 9 bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas saluran air di Desa Gemurung, Gedangan kemarin (29/4). Bangli tersebut menghambat aliran air sehingga menyebabkan banjir.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yany Setyawan mengatakan, di atas saluran air itu ada 22 bangli. Kini semuanya sudah

dibongkar. "Jumlah banglinya ada 22, sedangkan yang sudah dibongkar mandiri oleh pemilik ada 13, sisanya kita tertibkan hari ini (kemarin, Red)," katanya.

Penertiban berlangsung kondusif. Namun, ada sejumlah warga yang meminta ganti rugi ke Satpol PP dan Pemkab Sidoarjo. "Sempat ada yang minta, tapi kami tidak punya anggaran untuk itu, kita akan sampaikan ke pimpinan," imbuhnya.

Yany mengatakan, penertiban itu sebenarnya direncanakan sejak era bupati sebelumnya. Akan tetapi, sejumlah pedagang enggan

pindah. "Ini kan lahan saluran air. Selama bangunan masih berdiri, normalisasi *nggak* bisa dilakukan. Akibatnya air dari perumahan sekitar *nggak* bisa mengalir, jadi banjir," jelasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menambahkan, penertiban ini juga merupakan upaya untuk mengatasi potensi banjir di wilayah timur Sidoarjo. "Targetnya dua hari pembongkaran, lalu dilanjutkan dengan normalisasi," katanya. (eza/uzi)

# Jawa Pos



AHMAD REZA / JAWA POS

**PEDULI:** Direktur RS Siti Hajar dr H Iqbal Faizin (tiga dari kanan) memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan untuk guru TPQ, guru agama, dan marbot masjid dalam Harlah ke-62 RS Siti Hajar kemarin (29/4).

## Para Tokoh NU Dapat Kartu Prioritas Layanan RS Siti Hajar

**SIDOARJO** - Pada momen peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-62 kemarin (29/4), RS Siti Hajar Sidoarjo meluncurkan kartu prioritas layanan kesehatan eksekutif untuk para tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Mereka bisa mendapat layanan lebih cepat.

Direktur RS Siti Hajar dr H Iqbal Faizin menyampaikan, kartu layanan prioritas bernama Sitcard itu diberikan

ke para tokoh NU di Sidoarjo.

"Ini kartu khusus untuk pelayanan yang lebih cepat dan nyaman. Insya Allah ke depan bisa juga untuk pasien eksekutif umum lainnya," tambahnya.

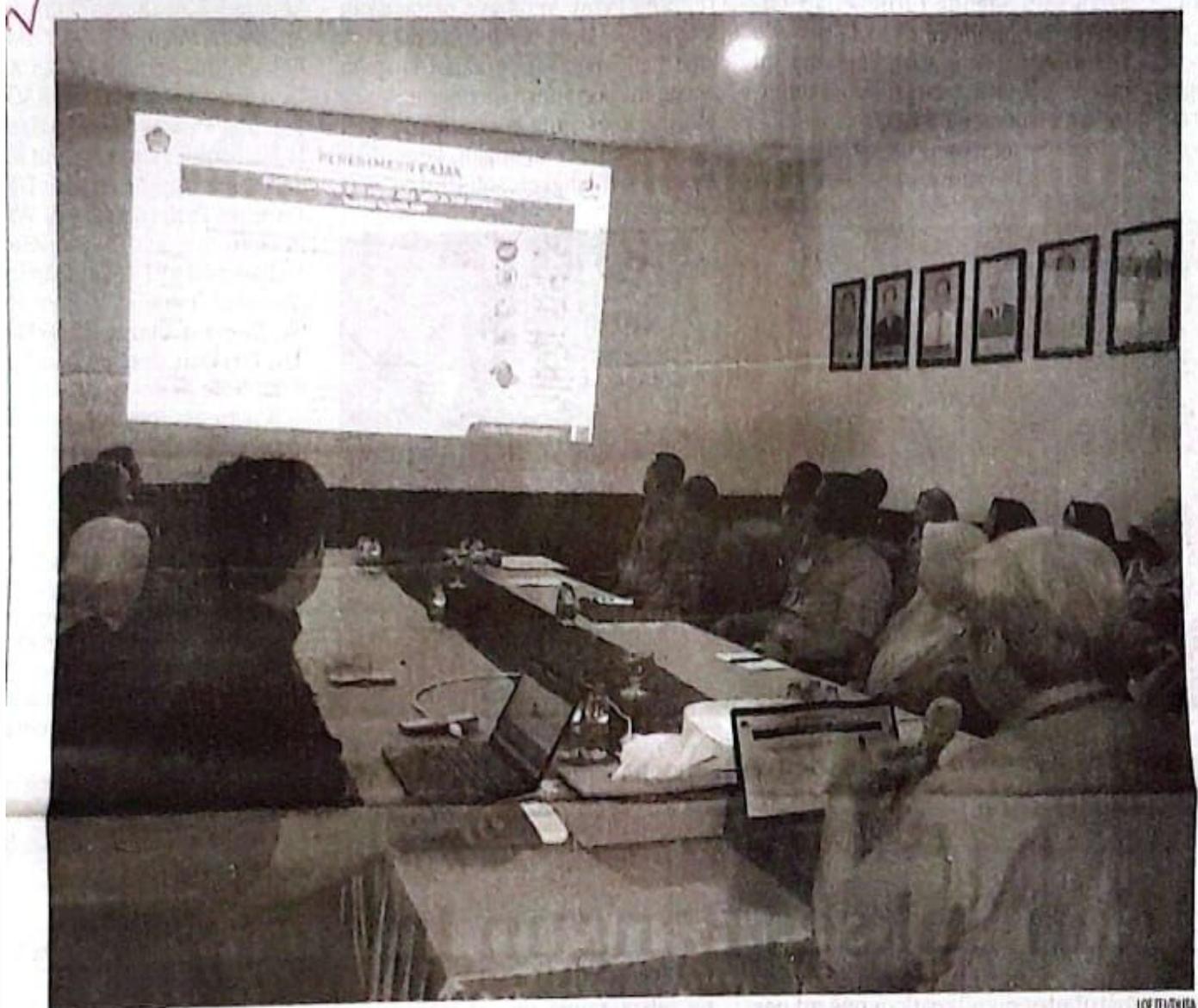
Selain itu, RS Siti Hajar juga mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para guru TPQ hingga marbot masjid di sekitar lingkungan rumah sakit. (eza/uzi)

# Jawa Pos



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



LOE/TV/OKLA

Kepala KPPN Sidoarjo dalam rilis kinerja APBN dikantor KPPN Sidoarjo, Selasa (29/4/25)

# Surplus Rp 1,22 Triliun, Siap Lanjutkan Pembangunan

**SIDOARJO** - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Sidoarjo hingga akhir Triwulan I tahun 2025 mencatat surplus sebesar Rp1.226,75 miliar. Dengan kinerja positif ini, pemerintah siap melanjutkan pembangunan, didukung anggaran untuk Triwulan II hingga akhir 2025 sebesar Rp6.779,14 miliar.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo, dalam rilis APBN yang disampaikan di hadapan puluhan pegawai dan staf pada Selasa (29/4/25), menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.102,08 miliar atau 17,94 persen dari pagu anggaran.

Didi Prihadi Wibowo dalam paparannya menyampaikan rincian realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Belanja pegawai: Rp823,59 mil-

iar dari pagu Rp3.614,98 miliar (22,78%).

Belanja barang: Rp113,53 miliar dari pagu Rp899 miliar (12,62%). Belanja modal: Rp164,94 miliar dari pagu Rp1.626,53 miliar (10,14%). Belanja sosial: Rp0,02 miliar dari pagu Rp0,05 miliar (38,70%)

"Sedangkan untuk transfer ke daerah, telah disalurkan sebesar Rp783,88 miliar atau 31,06 persen dari total pagu Rp1.739,73 miliar," ujar Didi Prihadi.

Masih kata Didi Prihadi melanjutkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH): Rp27,17 miliar dari pagu Rp221,32 miliar (12,28%). Dana Alokasi Umum (DAU): Rp400,88 miliar dari pagu Rp1.326,5 miliar (30,55%).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik: Rp161,79 miliar dari pagu Rp591,97 miliar (27,33%). Dana Desa: Rp194,03 miliar dari pagu Rp340,77 miliar (56,95%)

"Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp28,55 miliar dan

Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14,44 miliar, hingga akhir Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi," jelas Didi Prihadi.

Dari sisi penerimaan perpajakan, hingga akhir Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp3.003,24 miliar, yang terdiri atas. Pajak Penghasilan: Rp940,75 miliar. PPN dan PPNBM: Rp445,83 miliar. Cukai: Rp1.541,89 miliar. Pajak lainnya: Rp0,65 miliar. Pajak Perdagangan Internasional: Rp74,11 miliar.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp109,47 miliar. Rinciannya, PNBP Lainnya: Rp90,00 miliar dari target Rp190,35 miliar (47,28%), Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU): Rp19,47 miliar dari target Rp54,34 miliar (35,83%).

"Capaian ini menunjukkan stabilitas fiskal dan kesiapan pendanaan pem" gunan di Kabupaten Sidoarjo ke depan," pungkask Didi Prihadi. • Loe

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



# Delta Tirta Sidoarjo Raih

# TOP BUMD Awards 2025

**SIDOARJO** - Perumda Delta Tirta Sidoarjo berhasil mencatatkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Raffles, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Pada ajang bergengsi tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., dianugerahi sebagai TOP Pembina BUMD 2025 atas peran aktifnya dalam mendorong penguatan BUMD di daerah. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.M.T. dinobatkan sebagai TOP CEO BUMD 2025. Tak hanya itu, Perumda Delta Tirta Sidoarjo juga sukses meraih predikat BUMD Bintang 5 (Unggul/Luar Biasa).

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang solid, kepemimpinan yang efektif, penerapan manajemen yang selaras dengan visi perusahaan, serta kemampuan melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan Perumda Delta Tirta. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada pelanggan,"

ungkap Dwi Hary Soeryadi Senin sore, (28/4/25).

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pelanggan yang terus mendukung langkah-langkah Perumda Delta Tirta.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Bupati Sidoarjo, turut memberikan apresiasinya. Menurut Fenny, prestasi ini membuktikan bahwa BUMD di Sidoarjo mampu bersaing di tingkat nasional dengan kinerja yang membanggakan.

"Ini adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, inovasi, dan sinergi yang kuat, BUMD kita mampu menunjukkan performa terbaik. Saya berharap untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Fenny.

Fenny juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. "Kita harus terus berbenah, tidak boleh puas hanya dengan satu pencapaian. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga inovasi dan kolaborasi menjadi kunci keberlanjutan," tambahnya. ● Loe





Perumda Delta Tirta Sidoarjo berhasil raih prestasi penghargaan TOP BUMD Awards 2025.

## Sidoarjo Terima Penghargaan Pembangunan Daerah 2025

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan sebagai Terbaik 1 Kategori Kabupaten dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025, dalam acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Selasa (29/4).

Penghargaan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Sidoarjo. Karena untuk pertama kalinya sejak Anugerah PPD digelar, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih posisi puncak sebagai kabupaten dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan ajang evaluasi dan apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pencapaian pembangunan, termasuk inovasi yang dihasilkan.



Bupati Sidoarjo Subandi menerima penghargaan Pembangunan Daerah.

"Ini adalah hasil kerja nyata dan kolektif dari seluruh elemen daerah. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sukses dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sidoarjo," ujar Bupati Subandi.

Kata Subandi, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan yang selalu diarahkan ke arah yang lebih baik.

Dalam proses selanjutnya, PPD 2027 diharapkan secara bertahap dan bertahap melalui tiga tahapan utama: penilaian, verifikasi, dan verifikasi, serta verifikasi lapangan.

Melalui tahapan tersebut, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas. (ist/raa)

## Serahkan Petikan SK Pengangkatan ASN PPPK kepada 630 Tenaga Honorer

KOTA-Sebanyak 630 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang lulus seleksi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 akhirnya menerima petikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Penyerahan dilakukan secara digital oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana pada Selasa pagi (29/4/2025) di Jie Poek DW Resto Sidoarjo.

Para ASN PPPK menerima SK pengangkatan masing-masing melalui aplikasi resmi milik BKN, [myasn.bkn.go.id](https://myasn.bkn.go.id).

Dalam sambutannya, Wabup Mimik Idayana mengajak seluruh ASN PPPK untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik. Ia menyebut, keberhasilan menjadi ASN PPPK adalah pencapaian yang patut disyukuri karena tidak semua orang memperoleh kesempatan tersebut.

"Selamat kepada seluruh ASN PPPK yang telah menerima SK pengangkatan. Saya



BERSYUKUR: Sebanyak 630 tenaga honorer lulus seleksi ASN dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024.

mengingatkan bahwa di luar sana masih banyak masyarakat yang bercita-cita berada di posisi saudara saat ini," ujarnya.

Ia juga berharap para ASN

PPPK dapat bekerja dengan semangat dan penuh dedikasi. Amanah yang diterima, menurutnya, harus dijalankan sebaik mungkin sebagai bentuk pengabdian kepada

negara dan kontribusi nyata dalam mewujudkan Sidoarjo yang lebih maju dan sejahtera. "Ada beban tanggung jawab yang kini berada di pundak kalian. Laksanakan

tugas dengan penuh amanah dan maksimal. Siap?" serunya, yang dijawab serempak dengan "Siap!" oleh seluruh ASN PPPK.

Wabup Mimik juga menekankan pentingnya peningkatan wawasan, kepribadian, dan etika sebagai aparatur sipil negara yang profesional. Ia berharap para ASN PPPK dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja sama secara optimal dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, Budi Basuki, menjelaskan bahwa 630 ASN PPPK yang menerima SK terdiri dari: 332 tenaga teknis, 290 guru, dan 8 tenaga kesehatan.

Mereka merupakan peserta seleksi PPPK Tahap I yang dinyatakan lulus melalui ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) dari BKN, yang dilaksanakan pada 5-7 Desember 2024 di Universitas Aduana Surabaya. ([sai/vga](https://sai/vga))



## RSI Siti Hajar Luncurkan 'Red Carpet' Layanan Kesehatan dan BPJS Gratis untuk Marbot



PRIORITAS: Direktur RSI Siti Hajar, dr Iqbal Faizin, saat membagikan Sipcard kepada tamu undangan.

KOTA-Dalam rangka memperingati hari lahir (harlah) ke-62, RSI Siti Hajar meluncurkan program layanan kesehatan prioritas dan pemberian BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi pekerja sektor informal. Acara yang dikemas dalam bentuk halalbihalal ini digelar pada Selasa (29/4), dan dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Timur, jajaran PCNU, serta para Ketua MWC dan PAC Muslimat

se-Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan tersebut, rumah sakit membagikan Siti Hajar Priority Card (Sipcard), yaitu kartu layanan kesehatan prioritas yang memungkinkan pemegangnya mendapatkan pelayanan tanpa harus antri lama. Selain itu, obat yang dibutuhkan akan langsung dikirim ke rumah pasien.

"Kami menyebut ini sebagai layanan 'red carpet', karena menjadi bentuk

pelayanan khusus dan cepat bagi para pemegang kartu," ujar Direktur RSI Siti Hajar, dr Iqbal Faizin, kepada Radar Sidoarjo.

Selain layanan prioritas, RSI Siti Hajar juga bekerja sama dalam memberikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan gratis kepada pekerja informal, seperti guru TPQ, pengajar TPA, dan marbot masjid yang selama ini belum memiliki jaminan sosial. ([sai/vga](https://sai/vga))





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Menu

Pemerintah

## Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana Lakukan Sidak Perbaikan RTLH Di Desa Kletek

Media Sorot Mata    29 April 2025



untuk meninjau kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kletrek, Kecamatan Taman, Selasa (29/4/2025). Dalam sidak ini, Wabup didampingi oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo guna memberikan bantuan kepada salah satu keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Kedatangan rombongan disambut dengan harapan oleh Warsawan, warga Desa Kletek. Kondisi rumah Warsawan yang sudah rusak parah, dinding kayu yang rapuh serta tidak adanya fasilitas kamar mandi menjadi sorotan utama dalam kunjungan kali ini



Selain itu, Warsawan juga harus merawat saudara iparnya yang sakit dan tidak mampu berjalan. Anak-anak mereka telah berkeluarga dan tinggal terpisah jauh dari tempat tinggalnya saat ini, semakin membebani kondisi ekonomi keluarga tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Baznas akan segera melakukan renovasi total terhadap rumah Warsawan agar menjadi layak huni. Selain itu, pihaknya juga menjanjikan bantuan kursi roda bagi kerabat Warsawan yang sakit.

“Kami tidak bisa membiarkan warga hidup dalam kondisi seperti ini. Kami akan segera lakukan renovasi rumah Warsawan bersama Baznas Sidoarjo dan akan memberikan alat bantu kursi roda untuk adik dari istri Warsawan,” ujar Hj. Mimik Idayana.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sidoarjo juga menekankan kepada para Camat dan Kepala Desa untuk lebih proaktif dalam mendata warga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Saya minta kepada seluruh perangkat desa dan camat untuk segera identifikasi rumah tangga yang kurang mampu dan tinggal di rumah tidak layak huni. Jika sudah terdata, segeralah laporkan ke Baznas agar bisa kita bantu secepatnya.” tegasnya.

Warsawan merasa bersyukur atas bantuan dari Pemkab Sidoarjo. Dengan renovasi yang dilakukan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana dapat membuat rasa nyaman dan aman kepada keluarga.

“Saya berterima kasih kepada Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana sudah membantu keluarga kami untuk merenovasi rumah kami ini. Semoga dengan renovasi ini, keluarga saya dapat lebih aman dan nyaman untuk tinggal,” ucapnya dengan senyum bahagia.

Langkah cepat yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat. Mereka berharap, renovasi rumah dapat segera direalisasikan sehingga Warsawan dan keluarga bisa menjalani kehidupan yang lebih layak. Program penanganan RTLH ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Nuri)



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, yang mencerminkan cita-cita besar bangsa. Dalam hal ini, guru memegang peran kunci dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa tanpa guru yang profesional, sulit untuk melahirkan generasi yang tangguh dan berdaya saing.

Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari penguasaan materi dan metodologi pembelajaran, tetapi juga dari komitmen untuk terus belajar, adaptif terhadap perubahan zaman, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat kebangsaan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, termasuk dengan menyediakan ruang-ruang pengembangan diri bagi para guru. Kami percaya, pendidikan yang bermutu hanya akan lahir dari guru-guru yang berkualitas dan berdedikasi tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kegiatan PKB ini diharapkan seluruh guru dapat saling berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Forum ini menjadi sarana untuk memperkuat kompetensi, menjalin kolaborasi, dan menumbuhkan inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan akhlak peserta didik. Ia merasa prihatin terhadap fenomena anak-anak sekolah dasar yang sudah mengenal narkoba, rokok, dan seks bebas.

“Saya titipkan anak-anak kita. Mohon pengawasan maksimal dari panjenengan semua, melalui pendidikan karakter dan penanaman akhlak yang baik, pesannya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, lanjutnya, siap merangkul dan memfasilitasi dialog terbuka mengenai pendidikan. "Cukup miris rasanya mengetahui bahwa anak-anak usia sekolah dasar sudah mengenal hal-hal yang belum pantas mereka ketahui," ungkapnya.

"Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar dan berdampak nyata dalam proses pembelajaran, sehingga terwujud pendidikan yang berkarakter dan berakhlak mulia," pungkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 183 peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru ASN, dan guru honorer daerah Se-Kecamatan Prambon. (Nuri)



Satu per satu bangunan liar itu dibumihanguskan. Ambruk berkeping-keping. Rara-rata terbuat dari kayu dan beratap asbes. Puing-puing bangunan pun disingkirkan dari jalan.

Setelah itu, terlihat saluran air di bawahnya. Kotor. Banyak sampah berserakan. Terutama sampah plastik, seperti botol air mineral dan tas kresek. Warna air menghitam. (\*)





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Regional Jatim

## Dituding 'Wanprestasi' Kerjasama Parkir, Inilah Penjelasan Dirops PT ISS-KSO

"Bukannya kami tidak mau setor atas bagi hasil pada 2024. Tetap karena masih menunggu jawaban surat yang kami kirim ke Bupati Sidoarjo," kata Dian Sutjipto, Direktur Operasional PT ISS-KSO.

🕒 Apr 29, 2025 - 21:33



*Dian Sutjipto, Direktur Operasional PT ISS-KSO, dan pengelolaan parkir di kawasan GOR yang dipasang palang pintu sistem digital.*

NUSADAILY.COM- SIDOARJO : Dinilai *wanprestasi* sehingga pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Sidoarjo memutuskan kontrak kerjasama dalam pengelolaan parkir, PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-KSO memberi klarifikasi. Termasuk belum disetornya bagi hasil pengelolaan parkir pada 2024 ke Kasda Pemkab Sidoarjo, beralasan masih menunggu jawaban Bupati

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

“ Ini kan sudah kelewatan ngawurnya. Mereka begitu berani memasukkan data yang sebenarnya tidak dalam penguasaan dan pengawasannya. Lokasi parkir yang tidak berfungsi dimasukkan dalam PKS, seolah masih berfungsi,” ujarnya.

Tak hanya itu, setelah terseleksi menjadi hanya 221 lokasi parkir yang berfungsi, ternyata dari jumlah tersebut hanya ada 120 lokasi parkir yang berjukir resmi. Sisanya, 121 lokasi parkir lainnya dikuasai oleh pihak ketiga.

Bahkan ada aset milik desa (TKD) termasuk milik swasta (pajak parkir) ikut dicantumkan dalam perjanjian. “Jadi sejak awal saya menduga pihak pertama (Dishub,--red) sudah memiliki niat yang tidak baik dengan memasukkan data-data fiktif ke dalam akta perjanjian ”

Selain lokasi parkir yang menjadi masalah mendasar, permohonan penundaan pelaksanaan PKS itu juga dilandasi belum tersedianya sarana dan prasarana ( sarpras ) yang memadai sesuai pada akta perjanjian (PKS). “Jadi dari awal kami sebenarnya ingin menunda melanjutkan pelaksanaan kerjasama ini. Kami ingin temuan masalah yang begitu banyak itu diperbaiki lebih dulu. Tapi permohonan kami ditolak,” tukas Mas Dian

Atas penolakan itulah yang kemudian menyebabkan ISS-KSO dalam posisi dilematis. Dipaksa melanjutkan itu tahu banyak masalah, tapi kalau tidak melanjutkan dari awal kami sudah dihadapkan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan perusahaan akan dblacklist.“Dalam kondisi seperti itu kami terpaksa melanjutkan PKS, dengan keyakinan Dishub berkali-kali berjanji akan memperbaiki semua temuan yang bermasalah tersebut

dalam addendum,” katanya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Karena yang meyakinkan atas nama pemerintah kabupaten Sidoarjo maka ISS-KSO percaya, karena merekalah yang punya kebijakan dan kewenangan. “Ternyata ditengah jalan sampai sekarang tidak ada satupun perbaikan dalam addendum dilaksanakan dengan serius. Jadi sejak awal kami punya niat yang baik untuk membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola parkir. Dengan begitu Pemkab bisa menekan kebocoran pendapatan, masyarakatnya mendapat keuntungan perbaikan layanan parkir secara efisien dan hemat,” tegasnya.

Disinggung soal bagi hasil dalam pengelolaan tahun 2024 yang sampai sekarang belum disetor ke Kasda, Mas Dian mengakuinya. “Bukan berarti kami tidak mau setor bagi hasil. Tetap karena masih menunggu jawaban surat yang kami kirim ke Bupati Sidoarjo,” ujarnya. “Sampai hari ini Bupati belum juga memberi jawaban atas surat kami itu,” tambahnya.

Merujuk addendum kerjasama pada akhir 2023, jumlah titik parkir yang semula 359 telah dikurangi menjadi 87 titik sesuai permintaan PT ISS berdasarkan kajian potensi di lapangan. Dari kerjasama pengelolaan parkir ini diatur bagi hasil dengan komposisi 55 persen disetor ke Kasda Pemkab Sidoarjo, sisanya (45 %) menjadi hak PT ISS dengan target penghasilan Rp 12 miliar pertahun.

Sehingga pihak rekanan pada tahun 2024 berkewajiban menyetor Rp 6,6 miliar atau Rp 550 juta perbulan ke

Kasda Pemkab Sidoarjo.

Dian mengatakan untuk pengelolaan pada 2024, ada beberapa titik parkir telah mengalami penurunan potensi dari sisi pendapatan. Seperti titik kawasan Pasar Krian, menyusul terjadinya kebakaran. Begitu pula titik kawasan GOR, seyampang adanya kegiatan perbaikan Stadion Delta Sidoarjo.



Dian Sutjipto, Direktur Operasional (Dirops) PT ISS-KSO mengungkapkan pihaknya terpaksa menempuh jalur hukum atas keputusan Dishub Sidoarjo yang memutus kontrak kerjasama dalam pengelolaan parkir. Selain itu juga menuduh beberapa kali wanprestasi telah memantik kemarahan pihak perusahaan. “Pernyataan Kepala Dishub Sidoarjo bahwa pihak kami wanprestasi itu tendensius dan sarat kepentingan. Kami berencana menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan sekaligus,” kata Dian yang memberi penjelasan melalui Whatsapp (WA) kepada *nusadaily.com*, pada Selasa (29/04/2025) siang.

Lebih lanjut, dia membeber kronologis kerjasama dengan Dishub yang sejak awal banyak melakukan kesalahan prinsip dan mendasar. Salah satunya adalah memasukkan data palsu atau fiktif ke dalam surat perjanjian kerjasama. “Ruh dan substansi dari perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan layanan parkir dan gol yang diinginkan Dishub adalah pendapatan. Maka kalau datanya salah atau fiktif itu pasti berdampak kepada pendapatan. Apa itu bukan penipuan,” ujarnya.

Mas Dian, sapaan Dirops PT ISS-KSO ini pun mengungkapkan beberapa kesalahan mendasar dinas terkait yang berdampak pada macetnya kerjasama sejak awal. Merujuk Berita SK Bupati Kab Sidoarjo No. 188/655/488.1.1.3/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir Kabupaten Sidoarjo, tercatat ada 359 titik parkir yang akan dikelola oleh ISS-KSO.

Setelah divalidasi, ditemukan 4 titik parkir yang double input. Yang 'agak gila' dan terlalu ngawur adalah temuan bahwa dari 359 titik parkir yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama ( PKS ), ternyata hanya ada 21 lokasi parkir yang masih berfungsi.